

Dampak Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) terhadap Pengembangan Generasi Muda

The Impact of the Implementation of the Child Identity Card (KIA) Policy on the Development of the Young Generation

Muhsanati¹, Herman², Tri Frida Suryati³✉

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah, Mamuju, Indonesia.

✉Corresponding author: suryatifrida@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dan dampaknya terhadap pengembangan generasi muda di Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Tujuan penelitian melibatkan penilaian terhadap kontribusi KIA terhadap perlindungan hak anak, analisis dampak KIA terhadap akses anak-anak ke layanan pendidikan dan kesehatan, peran KIA dalam mencegah perdagangan anak, serta evaluasi perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya memiliki KIA. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mamuju memberikan dampak positif dalam perlindungan hak-hak konstitusional anak dan pengembangan generasi muda. Capaian keberhasilan antara tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepemilikan KIA oleh anak-anak, serta penurunan jumlah anak yang belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA naik dari 18,0% menjadi 20,1%, mencerminkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Beberapa langkah konkret yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, seperti pemberdayaan sistem informasi, sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi sistem, telah mendukung efektivitas implementasi KIA.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Child Identity Card (KIA) Policy and its impact on the development of the younger generation in Mamuju Regency. This type of research is qualitative research with an inductive approach. The objectives of the study involved an assessment of KIA's contribution to the protection of children's rights, an analysis of the impact of KIA on children's access to education and health services, the role of KIA in preventing child trafficking, as well as an evaluation of changes in people's mindset on the importance of having KIA. The results of the study stated that implementing the Child Identity Card (KIA) in Mamuju Regency positively impacted protecting children's constitutional rights and developing the younger generation. The success between 2021 and 2022 shows a significant increase in KIA ownership by children and a decrease in the number of children who do not have KIA. The percentage of KIA ownership increased from 18.0% to 20.1%, reflecting increased public awareness and participation. Several concrete steps taken by the Mamuju Regency Population and Civil Registration Office, such as information system empowerment, community socialization and education, as well as system monitoring and evaluation, have supported the effectiveness of KIA implementation.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Muhsanati, Herman, Tri Frida Suryati.

Article history

Received 2024-02-07

Revised 2024-03-20

Accepted 2024-04-25

Kata kunci

Implementasi Kebijakan; Kartu Identitas Anak (KIA).

Keywords

Impact of Child Identity Card (KIA); Policy Implementation.

1. Pendahuluan

Indonesia, dengan populasi yang besar, menghadapi beragam tantangan dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Salah satu permasalahan krusial adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA. Lebih dari sekadar dokumen identitas, KIA juga memiliki implikasi besar terhadap hak dan perlindungan anak-anak. Meskipun kebijakan penerbitan KIA telah diterapkan secara nasional, pemahaman masyarakat akan manfaatnya masih minim, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, ketidakpahaman terhadap manfaat KIA, dan keterbatasan akses informasi di beberapa wilayah.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (CAPIL) Kabupaten Mamuju mengemukakan bahwa ketidakpahaman masyarakat terhadap manfaat KIA, dan kurangnya akses informasi dapat berdampak negatif. Tertundanya pelayanan kesehatan menjadi konsekuensi serius, di mana anak-anak tanpa KIA kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memerlukan identifikasi resmi, seperti imunisasi atau layanan kesehatan reproduksi remaja. Anak-anak tanpa KIA juga menghadapi kesulitan mendaftar di sekolah, yang dapat menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah. Kurangnya pemahaman akan pentingnya KIA dapat membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi, pekerjaan anak, atau pernikahan dini karena kekurangan perlindungan hukum yang memadai. Mereka juga tidak dapat mengakses bantuan sosial atau program pemerintah lainnya yang memerlukan identifikasi resmi. Keterbatasan pemahaman tentang KIA dapat mengakibatkan kurangnya pelaporan dan penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Penerapan Teori Human Capital dalam konteks Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mamuju memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana KIA dapat diartikan sebagai modal manusia yang meningkatkan kapabilitas dan potensi generasi muda di hadapan tantangan masa depan. Teori Human Capital memandang manusia sebagai bentuk kapital atau barang modal yang perlu diinvestasikan, khususnya melalui bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut Todaro (2015), investasi dalam Human Capital terwujud melalui upaya meningkatkan tingkat konsumsi individu di masa depan. Pendidikan dan kesehatan menjadi bentuk investasi utama dalam Human Capital. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin banyak pelatihan yang diikuti, kemampuan dan keterampilan seseorang akan semakin meningkat. Kesehatan, yang erat kaitannya dengan pendidikan, juga memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas.

Pengukuran indikator kesehatan dalam Human Capital dapat menggunakan nilai angka harapan hidup (AHH), yang mencerminkan kualitas indikator kesehatan seseorang. Selain itu, metode lain seperti kematian bayi dan kematian ibu hamil juga dapat digunakan. Di sisi pendidikan, pengukuran indikator melibatkan tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memberikan gambaran kualitas pendidikan seseorang, mempertimbangkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran kesehatan dan kemampuan produktifitas.

Teori Human Capital juga mengidentifikasi lima komponen utama Human Capital, yang melibatkan Kecakapan Individu, Motivasi Individu, Budaya Organisasi, Efektivitas Tim Kerja, dan Kepemimpinan. Komponen-komponen ini memiliki peran berbeda dalam menciptakan Human Capital perusahaan, yang pada gilirannya menentukan nilai perusahaan. Investasi dalam kecakapan individu, motivasi individu, budaya organisasi, efektivitas tim kerja, dan kepemimpinan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan mengaitkan konsep Human Capital ke implementasi KIA, dapat dilihat bahwa KIA berperan sebagai investasi dalam bentuk pendidikan dan kesehatan anak-anak. Melalui KIA, anak-anak mendapatkan akses ke pendidikan formal dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk membangun Human Capital mereka. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA menjadi kunci dalam mengoptimalkan investasi ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan potensi generasi muda menjadi fokus strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kartu Identitas Anak dianggap sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak anak dan merangsang

potensi mereka. Meskipun ada banyak pedoman dasar, implementasi kebijakan pelayanan KIA di Kabupaten Mamuju dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, permasalahan administratif, dan perlunya meningkatkan dampak positif KIA terhadap pengembangan generasi muda.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan KIA dan dampaknya terhadap pengembangan generasi muda di Kabupaten Mamuju. Latar belakang dan permasalahan tersebut memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi tantangan konkret yang dihadapi dalam implementasi kebijakan KIA guna mendukung pengembangan generasi muda di Kabupaten Mamuju. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) guna Mengembangkan Generasi Muda di Kabupaten Mamuju.

2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) terhadap pengembangan generasi muda di Kabupaten Mamuju. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju selama periode Mei hingga September 2023. Target sasaran penelitian mencakup anak-anak yang telah menerima KIA, orang tua atau wali yang terlibat dalam proses penerbitan KIA, pihak terkait dalam pemerintahan setempat, dan masyarakat umum yang terdampak oleh kebijakan KIA.

Tujuan penelitian melibatkan penilaian kontribusi implementasi KIA terhadap perlindungan hak anak, analisis dampak KIA terhadap akses anak-anak ke layanan pendidikan dan kesehatan, pemahaman peran KIA dalam mencegah perdagangan anak, serta evaluasi perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya memiliki KIA.

Rancangan penelitian kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi temuan utama terkait dampak implementasi KIA.

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, observasi langsung terhadap proses implementasi KIA, dan analisis dokumen terkait kebijakan, data statistik, laporan implementasi, dan materi promosi KIA.

Teknik pengolahan data melibatkan transkripsi wawancara, kategorisasi, dan pengkodean data untuk mengidentifikasi pola atau hubungan. Pengolahan dokumen termasuk analisis terhadap dokumen kebijakan dan laporan terkait.

Teknik analisis data mencakup analisis tematik, matriks analisis, dan pemodelan data untuk memahami dinamika dan dampak implementasi KIA.

Keberlanjutan dan validitas data dijamin melalui pemantauan berkala, validitas silang, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penelitian.

Penelitian ini penting untuk memahami efektivitas kebijakan KIA dalam konteks pengembangan generasi muda. Dengan mendapatkan wawasan dari berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan strategi implementasi yang lebih baik di masa depan

3. Hasil dan Pembahasan

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan inisiatif yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), sejalan dengan ketentuan Permendagri nomor 2 tahun 2016 yang mengatur tentang Kartu Identitas Anak. KIA berperan serupa dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun ditujukan khusus untuk anak-anak dengan rentang usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perlu dicatat bahwa KIA untuk bayi dan balita tidak menampilkan foto, sementara KIA untuk kelompok usia 5-17 tahun kurang satu hari dilengkapi dengan foto.

Fokus utama KIA adalah untuk menjaga hak-hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Meskipun memiliki kesamaan fungsi dengan KTP-elektronik, KIA tidak mengandung chip seperti yang terdapat pada KTP-elektronik. Sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 2

tahun 2016, KIA memberikan sejumlah manfaat, antara lain: (1) melindungi hak-hak anak, (2) menjamin akses ke sarana umum, (3) berfungsi sebagai bukti identitas saat anak menghadapi kejadian tidak menguntungkan, (4) berperan dalam mencegah perdagangan anak, dan (5) memudahkan anak untuk mengakses layanan publik, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan imigrasi.

Pada tanggal 27 Agustus 2019, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, secara resmi meluncurkan Kartu Identitas Anak (KIA). Bupati Mamuju yang menjabat pada saat itu, Habsi Wahid, memberikan pernyataan mengenai beberapa kelebihan KIA diantaranya, adalah berfungsi sebagai tanda pengenal anak yang dapat digunakan untuk mengurus sejumlah dokumen, menggantikan ketergantungan pada dokumen orang tua yang biasanya diperlukan. KIA dapat digunakan dalam berbagai keperluan, termasuk administrasi keimigrasian, pelayanan kesehatan, bahkan pembelian tiket pesawat. Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Mamuju lebih dari 2.000 KIA sejak tahun 2019.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tahun 2021 merilis data Jumlah Kepemilikan KIA berdasarkan Kecamatan, berikut persentase capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Mamuju tahun 2021:

- 1) Kecamatan Mamuju memiliki jumlah wajib KIA sebanyak 21.874 anak, di mana 5.187 anak sudah memiliki KIA, dan 16.687 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Mamuju mencapai 23.7%.
- 2) Kecamatan Tapalang dengan jumlah wajib KIA sebanyak 7.346 anak, 1.770 anak di antaranya sudah memiliki KIA, sedangkan 5.576 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Tapalang mencapai 24.2%.
- 3) Pada tahun 2021, Kecamatan Kalukku memiliki 20.167 wajib KIA, di mana hanya 1.659 anak yang sudah memiliki KIA, sedangkan 18.508 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Kalukku adalah 8.2%.
- 4) Kecamatan Kalumpang dengan jumlah wajib KIA 3.691 anak, hanya 162 anak yang sudah memiliki KIA, dan 3.529 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Kalumpang mencapai 4.4%.
- 5) Kecamatan Papalang memiliki jumlah wajib KIA di Kecamatan Papalang sebanyak 7.696 anak, di mana 1.434 anak sudah memiliki KIA, dan 6.262 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Papalang mencapai 18.6%.
- 6) Pada tahun 2021, Kecamatan Sampaga memiliki jumlah wajib KIA 4.532 anak, 862 anak di antaranya sudah memiliki KIA, dan 3.670 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Sampaga mencapai 19.0%.
- 7) Kecamatan Tommo memiliki jumlah wajib KIA 7.191 anak, 1.291 anak di antaranya sudah memiliki KIA, dan 5.900 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Tommo mencapai 18.0%.
- 8) Pada tahun 2021, Kecamatan Simboro memiliki jumlah wajib KIA 12.604 anak, 2.682 anak di antaranya sudah memiliki KIA, dan 9.922 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Simboro adalah 21.3%.
- 9) Kecamatan Tapalang Barat memiliki jumlah wajib KIA 4.481 anak, 1.350 anak di antaranya sudah memiliki KIA, dan 3.131 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Tapalang Barat mencapai 30.0%.
- 10) Kecamatan Bonehau memiliki jumlah wajib KIA di Kecamatan Bonehau sebanyak 2.599 anak, di mana 218 anak sudah memiliki KIA, dan 2.381 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Bonehau adalah 8.4%.
- 11) Kecamatan Bala Balakang memiliki jumlah wajib KIA 840 anak, 127 anak di antaranya sudah memiliki KIA, dan 713 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Bala Balakang mencapai 15.1%.

Jadi, pada tahun 2021 Kabupaten Mamuju memiliki total wajib KIA sebanyak 93.021 anak, di mana 16.742 anak sudah memiliki KIA, dan 76.279 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Mamuju mencapai 18.0%.

Sementara, tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju merilis data Jumlah Kepemilikan KIA berdasarkan Kecamatan, berikut persentase capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Mamuju;

Berikut adalah data kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan kecamatan di Kabupaten Mamuju pada tahun 2022, yaitu:

- 1) Kecamatan Mamuju sejumlah 4.824 anak sudah memiliki KIA, dan 15.930 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Mamuju mencapai 23.2%
- 2) Kecamatan Tapalang sejumlah 1.661 anak di antaranya sudah memiliki KIA, sedangkan 5.155 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Tapalang mencapai 24.4%.
- 3) Pada tahun 2022, Kecamatan Kalukku sejumlah 1.768 anak yang sudah memiliki KIA, sedangkan 17.497 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Kalukku adalah 9.2%.
- 4) Kecamatan Kalumpang hanya 671 anak yang sudah memiliki KIA, dan 2.801 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Kalumpang mencapai 19.4%.
- 5) Kecamatan Papalang memiliki sejumlah 1.570 anak sudah memiliki KIA, dan 5.744 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Papalang mencapai 21.5%.
- 6) Pada tahun 2022, Kecamatan Sampaga hanya sejumlah 884 anak di antaranya sudah memiliki KIA, dan 3.485 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Sampaga mencapai 20.2%.
- 7) Kecamatan Tommo 1.510 anak di antaranya sudah memiliki KIA, dan 5.266 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Tommo mencapai 22.3%.
- 8) Pada tahun 2022, Kecamatan Simboro sejumlah 3.052 anak di antaranya sudah memiliki KIA, dan 9.608 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Simboro adalah 24.1%.
- 9) Kecamatan Tapalang Barat 1.162 anak di antaranya sudah memiliki KIA, dan 3.040 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Tapalang Barat mencapai 27.7%.
- 10) Kecamatan Bonehau hanya 379 anak sudah memiliki KIA, dan 2.067 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Bonehau adalah 15.5%.
- 11) Kecamatan Bala Balakang hanya 377 anak di antaranya sudah memiliki KIA, dan 404 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kecamatan Bala Balakang mencapai 48.3%.

Jadi, pada tahun 2022 Kabupaten Mamuju memiliki sejumlah 17.858 anak sudah memiliki KIA, dan 70.997 anak belum memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Mamuju mencapai 20.1%.

Capaian keberhasilan antara tahun 2021 dan 2022 terkait kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mamuju, terlihat perubahan yang signifikan dalam beberapa aspek dimana pada tahun 2021, tercatat 16.742 anak yang sudah memiliki KIA, sementara 76.279 anak masih belum memiliki, dengan persentase kepemilikan KIA sebesar 18.0%. Sementara itu, pada tahun 2022, jumlah anak yang sudah memiliki KIA meningkat menjadi 17.858 anak, sedangkan yang belum memiliki turun menjadi 70.997 anak. Persentase kepemilikan KIA pada tahun tersebut mencapai 20.1%. Perbandingan ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses Kartu Identitas Anak sebagai upaya perlindungan hak anak di Kabupaten Mamuju.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan, Hj. Hartini, S.E. di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada 09 Oktober 2023, berikut ini disajikan hasil wawancara dengan informan utama dalam penelitian ini; Hj. Kartini, S.E., memberikan pernyataan tentang kontribusi KIA terhadap pengembangan generasi muda Mamuju, sebagai berikut”

“Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) telah memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan generasi muda di wilayah ini. KIA telah menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak konstitusional anak sejak usia dini. Dengan adanya KIA, pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, menjadi lebih

terfokus dan efisien. KIA membantu memastikan akses anak-anak terhadap berbagai layanan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Dengan identitas yang jelas dan terdokumentasi, anak-anak dapat lebih mudah mengakses program-program pembangunan yang ditujukan untuk mereka. Selain itu, KIA juga berperan sebagai instrumen pencegahan terhadap perdagangan anak, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan optimal bagi generasi muda di Kabupaten Mamuju. KIA sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Mamuju”.

Hj. Hartini, Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, menyampaikan bahwa upaya meningkatkan akses anak-anak terhadap layanan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, pihaknya telah mengambil beberapa langkah konkret terkait implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mamuju, sebagai berikut:

“Langkah-langkah konkret tersebut adalah pemberdayaan sistem informasi dengan melakukan penyelarasan data antara berbagai instansi terkait, termasuk dinas pendidikan dan dinas kesehatan, untuk memastikan keberlanjutan pelayanan yang terintegrasi. Kemudian dilakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat, menciptakan jalur komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak berwenang dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki KIA dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan. DUKCAPIL Mamuju juga Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Sistem secara rutin untuk peningkatan terus-menerus dalam sistem pelayanan. Dan masyarakat nantinya dapat melihat dampak yang ditimbulkan dari implementasi KIA ini mencakup peningkatan jumlah anak yang terdaftar dan menggunakan KIA, serta pengurangan hambatan administratif dalam akses pendidikan dan kesehatan’.

Hj. Hartini menjelaskan dengan rinci tentang bagaimana Kartu Identitas Anak (KIA) berperan dalam mencegah perdagangan anak di Kabupaten Mamuju. Berikut pernyataannya:

“KIA menjadi alat utama untuk mengidentifikasi setiap anak di Kabupaten Mamuju secara resmi, dengan demikian setiap anak yang terdaftar dapat dipantau secara lebih efektif oleh pihak berwenang. Kemudian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan pihak keamanan dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa data yang terkandung dalam KIA akurat dan terkini. Ini membantu dalam upaya identifikasi dini terhadap anak-anak yang berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. DUKCAPIL Mamuju juga selalu melaksanakan kampanye kesadaran masyarakat yang difokuskan pada bahaya pencegahan perdagangan anak dan pentingnya memiliki KIA. Kampanye ini melibatkan media sosial, kegiatan di komunitas-komunitas yang fokus pada pemberdayaan anak dan perempuan, dan pendekatan langsung ke sekolah-sekolah. Selain langkah-langkah tersebut terdapat pula upaya untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam melindungi anak-anak dengan membantu memastikan bahwa setiap anak memiliki KIA yang sah dan terdaftar. DUKCAPIL Mamuju terus melakukan penguatan kerjasama antar instansi termasuk kepolisian, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak setempat. Kerjasama ini bertujuan untuk mendeteksi dan menanggapi terhadap kasus perdagangan anak secara lebih efektif jika hal tersebut terjadi”.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju yaitu Agung Pattola Mustar Lazim menjelaskan cara efektif mengukur dampak Kartu Identitas Anak (KIA) melalui sejumlah indikator dan parameter. Berikut pernyataannya;

“Cara DUKCAPIL Mamuju mengukur dampak Kartu Identitas Anak (KIA) menggunakan indikator dan parameter tertentu untuk mengevaluasi keberhasilannya, diantaranya ; Meningkatnya jumlah anak yang telah menerima KIA sebagai indikator awal keberhasilan implementasi program. Kemudian meningkatnya jumlah anak yang

dapat mengakses layanan pendidikan secara lancar dengan KIA sebagai syarat administratif yang terpenuhi. Meningkatnya fungsi KIA dalam mendukung akses anak-anak ke layanan kesehatan, seperti imunisasi dan perawatan preventif. Mengevaluasi keberhasilan implementasi KIA berdampak positif terhadap penurunan kasus perdagangan anak di Kabupaten Mamuju. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program KIA sebagai indikator keberlanjutan”.

4. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mamuju menunjukkan dampak positif dalam perlindungan hak-hak konstitusional anak sejak usia dini. KIA, sebagai inisiatif Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan generasi muda di wilayah ini. Perbedaan signifikan terlihat dalam capaian keberhasilan antara tahun 2021 dan 2022. Jumlah anak yang memiliki KIA meningkat dari 16.742 menjadi 17.858, sementara anak yang belum memiliki KIA berkurang dari 76.279 menjadi 70.997. Persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Mamuju naik dari 18.0% menjadi 20.1%, mencerminkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penelitian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dan peneliti selanjutnya adalah menggunakan teori-teori fundamental diantaranya teori perubahan (Theory of Change), model logika (logical framework), dan Lima Dimensi Dampak (Five Dimensions of Impact) untuk mengukur dampak implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) terhadap pengembangan generasi muda Mamuju di masa depan.

Penerapan teori perubahan (Theory of Change) Michael Quinn Patton, John Mayne, Robert Kaplan dalam Dame Manalu (2023) dimana, pada kebijakan KIA dapat diterapkan untuk menganalisis tujuan jangka panjang dalam konteks kepemilikan KIA. Tujuan jangka panjangnya adalah perlindungan hak anak, peningkatan akses layanan, dan pencegahan perdagangan anak. Komponen yang diperlukan untuk mencapai perubahan tersebut melibatkan penyelarasan data, sosialisasi, evaluasi sistem, dan kerjasama antarinstansi. Kesadaran masyarakat, pemanfaatan KIA dalam layanan pendidikan dan kesehatan, serta perubahan pola pikir terhadap perdagangan anak merupakan elemen kunci dalam teori perubahan ini.

Penerapan model logika Robert Kaplan dan David Norton (pencipta Balanced Scorecard) dan Max Weber (pengembang konsep model logika) dalam Dame Manalu (2023) guna mengidentifikasi input, kegiatan, dan output yang dapat menghasilkan dampak jangka pendek serta perubahan pada tujuan jangka panjang. Input dapat melibatkan sumber daya seperti personel, dana, dan teknologi. Kegiatan mencakup langkah-langkah konkrit seperti penyelarasan data, sosialisasi, dan evaluasi sistem. Outputnya termasuk jumlah KIA yang diterbitkan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan akses layanan. Dampak jangka pendek dan perubahan jangka panjang mencakup peningkatan kesadaran, peningkatan kepemilikan KIA, dan penurunan kasus perdagangan anak.

Penerapan Lima Dimensi Dampak (Five Dimensions of Impact) David Bonbright dan Mark W. Abkowitz dalam Dame Manalu (2023) dimana, Lima Dimensi Dampak memberikan perspektif mendalam pada dampak sosial KIA di Kabupaten Mamuju: Apa (What): Identifikasi anak-anak dan peningkatan akses layanan melalui KIA, Siapa (Who): Anak-anak, masyarakat, dan pemerintah setempat, Berapa Banyak (How much): Peningkatan jumlah anak dengan KIA dan tingkat partisipasi masyarakat, Kontribusinya Apa (Contribution): Kontribusi terhadap perlindungan hak anak, efisiensi layanan publik, dan pencegahan perdagangan anak. Dan Risikonya Apa (Risk): Risiko administratif, sosial, dan keamanan data.

Integrasi teori perubahan, model logika, dan Lima Dimensi Dampak dapat memberikan pandangan yang holistik tentang perubahan yang diharapkan dan dampak KIA di Kabupaten Mamuju. Analisis ini dapat membantu dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program secara komprehensif.

Daftar Pustaka

- Arista, Windi Dwi, and Wayan Suderana. 2019. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3(1):56. doi:10.38043/jids.v3i1.1733
- Apriliani, Kadek. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Denpasar. *Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, 11(1), 1-9.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2023. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022*.
- Jaka P. (2018). *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018*. Skripsi. Cilegon: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Linda R. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017*. Skripsi. Cilegon: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Ramadhanti, Gita, Rizki Hegia Sampurna, & Andi Mulyadi. (2021). *Efektivitas Implementasi Program Kartu Identitas Anak*. *Jurnal GOVERNANSI*, 7(1), 51-58.
- Sapitri, Nadia. (2021). *Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019*. *JOM FISIP*, 8(1), 1-12.
- Rahmawati Sururama, Alfariz Firdausya Bintang Permana. 2021. "Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 10(3):1-17.
- Rispati Ningsih. 2021. "Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru." *Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas*
- Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Rohman, Nur, Endang Wirjatmi, Tri Lestari, and Ely Sufianti. 2021. "Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta." *Ilmu Administrasi Negara* 8:130-41.
- Sari, Windy Aulia. (2019). *Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1694.
- Sitepu. (2010). *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia dan Bantuan Langsung Tunai terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia*. Jakarta.
- Todaro, M.P. (2003). *Ekonomi Pembangunan di Dunia ketiga*. terjemahan Mursid, Penerbit Balai Aksara, Jakarta.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 - Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil . Peraturan Menteri Dalam Negeri No . 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.